



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : INSPEKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DADANG HARDIWAN**
2. Jabatan : **INSPEKTUR UTAMA**
3. NHK : **236238**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.256.850.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/80 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/21 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/96 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/84 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/200 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000
6. Tanah Seluas 222 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 126.850.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **220.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **102.719.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	70.801.903
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.650.370.903
III. HUTANG	Rp.	215.494.373
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.434.876.530

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.